



Teknologi dan Media dalam Konflik Suriah: Pasca Runtuhnya Rezim Bashar Al-Assad

Faruq Alkafi* 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 55281, Indonesia

*Corresponding Author: Faruqkhan739@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19 December 2024

Revised 16 May 2025

Accepted 26 July 2025

Available online 30 July 2025

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Alkafi, F (2025). Teknologi dan Media dalam Konflik Suriah: Pasca Runtuhnya Rezim Bashar Al-Assad. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 17 (2), 116-124.

ABSTRACT

This study aims to analyze the dual role of technology and digital media in post-Bashar al-Assad Syria, focusing on its potential as a tool for reconciliation and reconstruction, as well as its risks in exacerbating disinformation and social polarization. A qualitative literature review method was employed, incorporating academic sources, international organization reports, and comparative case studies from similar conflicts in Iraq and Afghanistan. The findings reveal technology's ambivalent function: it serves as a means for documenting human rights violations, mobilizing global solidarity, and ensuring economic reconstruction transparency through innovations like blockchain and big data analytics. However, it also facilitates propaganda, disinformation, and public opinion manipulation, which deepen societal divisions. Lessons from other conflicts demonstrate that technology's effectiveness in political transition depends heavily on local infrastructure, digital literacy, and inclusive regulations. The study concludes by emphasizing the need for comprehensive policies, including improved technological access, regulation of harmful content, and the use of digital platforms to foster inclusive narratives. With this approach, technology can catalyze peace and stability in Syria, though political and structural challenges must be concurrently addressed.

Keyword: Technology, Digital Media, Syrian Conflict, Political Transition, Reconciliation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ambivalen teknologi dan media digital dalam konflik Suriah pasca kejatuhan rezim Bashar al-Assad, dengan fokus pada potensinya sebagai alat rekonsiliasi dan rekonstruksi, sekaligus risikonya dalam memperdalam disinformasi dan polarisasi sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, meliputi analisis literatur akademis, laporan organisasi internasional, dan studi kasus komparatif dari konflik serupa di Irak dan Afghanistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi berperan ganda: sebagai sarana dokumentasi pelanggaran HAM, mobilisasi solidaritas global, dan transparansi rekonstruksi ekonomi, tetapi juga menjadi alat propaganda, disinformasi, dan manipulasi opini publik. Pembelajaran dari negara lain mengungkap bahwa efektivitas teknologi dalam transisi politik sangat bergantung pada infrastruktur, literasi digital, dan regulasi yang inklusif. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya kebijakan holistik, termasuk penguatan akses teknologi, regulasi konten berbahaya, dan pemanfaatan media digital untuk membangun narasi inklusif. Dengan pendekatan ini, teknologi dapat menjadi katalis bagi perdamaian dan stabilitas di Suriah, meskipun tantangan politik dan struktural tetap harus diatasi..

Kata Kunci: Teknologi, Media Digital, Konflik Suriah, Transisi Politik, Rekonsiliasi.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

1. Pendahuluan

Konflik Suriah telah menjadi salah satu tragedi kemanusiaan yang paling kompleks dan destruktif di abad ke-21, dengan dampak yang meluas tidak hanya di kawasan Timur Tengah tetapi juga secara global. Sejak dimulainya perang saudara pada tahun 2011, lebih dari 500.000 orang tewas, menurut laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR, 2021), sementara sekitar 6,8 juta orang menjadi pengungsi di luar negeri dan 6,9 juta lainnya mengungsi di dalam negeri (UNHCR, 2022). Konflik ini tidak hanya menghancurkan tatanan sosial dan infrastruktur Suriah, tetapi juga menjadi medan persaingan geopolitik antara aktor global dan regional, seperti Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan Turki. Di tengah krisis ini, teknologi dan media telah memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika konflik, baik sebagai alat untuk mendokumentasikan kekejaman maupun sebagai platform propaganda dan mobilisasi. Pada tahun 2021, diperkirakan ada sekitar 16,991 juta ponsel yang digunakan di Suriah. Operator seluler yang beroperasi di negara ini antara lain Syriatel, MTN Syria, dan Wafa. Layanan telepon seluler mencakup sebagian besar wilayah Suriah, menjangkau sekitar 96% dari total populasi (Reuters, 2022), teknologi telah menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi, meskipun infrastruktur internet terbatas akibat konflik. Setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad, peran teknologi dan media diprediksi akan semakin vital, baik dalam proses transisi politik, rekonstruksi narasi nasional, maupun dalam mendukung upaya rekonsiliasi di Suriah.

Secara historis, media telah menjadi alat penting dalam memobilisasi massa dan membentuk opini publik selama konflik besar, termasuk di Suriah. Sejak dimulainya protes anti-pemerintah pada 2011, platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube telah digunakan untuk menyebarkan informasi, mengorganisir aksi protes, serta mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh berbagai pihak. Teknologi digital juga memberi kesempatan bagi masyarakat internasional untuk menyaksikan secara langsung eskalasi kekerasan di Suriah, meskipun sering kali disertai dengan penyebaran disinformasi dan propaganda. Tren terkini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi kini telah menjadi medan perang baru, di mana aktor negara dan non-negara bersaing untuk memenangkan "perang narasi". Menurut laporan Euro News (Reuters, 2022), Layanan telepon seluler mencakup sebagian besar wilayah Suriah, menjangkau sekitar 96% dari total populasi, meskipun infrastruktur internet terbatas akibat dampak konflik. Di sisi lain, diaspora Suriah memanfaatkan media digital untuk menjaga hubungan dengan tanah air, melobi komunitas internasional, dan mendesak reformasi politik di masa depan. Dalam konteks pasca jatuhnya rezim Bashar al-Assad, peran teknologi akan semakin penting. Sebagai contoh, rekaman digital yang dihasilkan selama perang berpotensi menjadi bukti kunci dalam proses peradilan transisi untuk mengadili kejahatan perang. Selain itu, media sosial dapat menjadi alat penting untuk menyatukan kembali masyarakat Suriah yang terpecah secara sektarian dan etnis. Namun, potensi positif ini juga dibarengi dengan tantangan besar, seperti penyalahgunaan teknologi untuk mempromosikan ekstremisme, memperburuk polarisasi, atau memanipulasi proses politik melalui kampanye disinformasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran teknologi dan media dalam lanskap politik, sosial, dan budaya Suriah setelah kejatuhan rezim Assad.

Kajian ini mengacu pada pemikiran Manuel Castells (Castells, 2013) mengenai peran jaringan sosial dalam dinamika gerakan politik, yang memberikan wawasan penting tentang bagaimana media digital turut membentuk narasi konflik di Suriah. Castells menekankan bahwa teknologi berfungsi bukan hanya sebagai sarana komunikasi, melainkan juga sebagai arena pertarungan ideologis. Pandangan ini dilengkapi oleh penelitian AlDajani (AlDajani, 2024), yang menyoroti potensi teknologi dalam mendukung transformasi konflik, sekaligus menekankan bahaya penyalahgunaannya untuk kepentingan propaganda. Kritik terhadap literatur yang ada mengungkap beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar studi fokus pada periode konflik aktif, bukan transisi pasca-konflik. Kedua, data tentang Suriah sering kali terkotak-kotak oleh kepentingan politik pihak-pihak yang bertikai. Ketiga, minimnya penelitian tentang adaptasi teknologi lokal (bukan impor) dalam konteks Suriah. Kendala-kendala ini menyiratkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ambivalen teknologi dan media digital dalam konteks konflik Suriah pasca kejatuhan rezim Bashar al-Assad, dengan menyoroti kemampuannya sebagai instrumen rekonsiliasi dan rekonstruksi, sekaligus risikonya dalam menyebarkan disinformasi dan memperdalam polarisasi sosial. Penelitian ini berusaha mengungkap pola-pola pemanfaatan teknologi dalam konflik serupa—seperti di Irak dan Afghanistan—untuk menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung transisi politik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menawarkan rekomendasi kebijakan yang inklusif guna mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Suriah. Dengan mengintegrasikan analisis akademik, data empiris, serta pengalaman lintas negara, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap upaya rekonstruksi Suriah secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif berbasis kajian pustaka untuk menganalisis peran teknologi dan media dalam konflik Suriah pasca runtuhnya rezim Bashar al-Assad. Kajian pustaka dilakukan dengan menggabungkan sumber-sumber akademik, laporan organisasi internasional, dan studi kasus dari konflik serupa untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif. Kajian ini merujuk pada berbagai sumber data yang mencakup literatur akademik tentang media digital, teknologi, dan konflik politik, serta studi terbaru mengenai rekonsiliasi berbasis teknologi. Selain itu, kajian ini juga memanfaatkan laporan dari organisasi internasional seperti UNHCR, UNDP, dan UNICEF yang menyediakan data statistik mengenai dampak konflik, akses terhadap teknologi, serta upaya rekonstruksi di Suriah. Untuk memperkaya analisis, digunakan pula studi kasus komparatif dari konflik di Irak dan Afghanistan guna mengevaluasi efektivitas teknologi dalam konteks pasca-konflik, termasuk tantangan dan pelajaran yang dapat diterapkan pada situasi di Suriah.

Kajian ini mengeksplorasi bagaimana media sosial memainkan peran penting dalam membentuk narasi konflik dan rekonsiliasi di Suriah. Media sosial telah digunakan sebagai alat dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, media sosial juga menjadi saluran penyebaran propaganda dan disinformasi, yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara. Dalam kerangka analisis komparatif, kajian ini mengacu pada pembelajaran dari konflik di negara lain guna mengidentifikasi pola dan tantangan yang mungkin dihadapi Suriah. Penggunaan teknologi dalam proses rekonstruksi pasca-konflik menjadi salah satu fokus, termasuk keberhasilan penerapan blockchain untuk transparansi distribusi bantuan maupun risiko polarisasi yang ditimbulkan oleh media sosial. Dari sini, kajian ini menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, seperti pentingnya penguatan literasi digital serta pembangunan infrastruktur teknologi yang mendukung proses rekonsiliasi dan pemulihan pasca-konflik.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian media, teknologi, dan politik Timur Tengah untuk menganalisis secara komprehensif peran teknologi dalam penyelesaian konflik Suriah, terutama setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi, bukan hanya dari satu disiplin ilmu, guna memahami kompleksitas situasi pasca-konflik. Dari perspektif studi media, analisis akan difokuskan pada penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi selama konflik, baik oleh aktor negara maupun non-negara. Teori komunikasi massa dan media digital, seperti teori agenda-setting dan jaringan masyarakat yang dikembangkan oleh Manuel Castells, akan digunakan untuk menganalisis bagaimana narasi konflik dibangun, disebarluaskan, dan dimanipulasi di dunia digital (Castells, 2013). Dalam konteks studi teknologi, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), analisis data besar (*big data*), dan algoritma media sosial, terhadap dinamika politik dan sosial di Suriah. Pendekatan ini akan menyoroti potensi teknologi dalam mendorong rekonsiliasi nasional, namun juga mengkritisi tantangan yang ditimbulkan, seperti penyebaran disinformasi dan manipulasi opini publik. Dari sudut pandang politik Timur Tengah, penelitian ini mengadopsi pendekatan pasca-konflik untuk meneliti bagaimana teknologi dapat mempengaruhi proses transisi politik dan rekonstruksi sosial di wilayah yang terpecah secara etnis, agama, dan sektarian. Perspektif politik internasional juga penting dalam memahami peran aktor global dan regional dalam membentuk masa depan Suriah melalui teknologi.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran Media Digital dalam Konflik Suriah

Dalam konflik Suriah, media digital telah memainkan peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai sarana komunikasi tetapi juga sebagai alat strategis yang digunakan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan politik, militer, dan sosial. Teknologi digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform berbagi video, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konflik ini. Peran media digital dapat dilihat dalam tiga aspek utama: propaganda, dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan mobilisasi massa.

Sejak dimulainya konflik pada 2011 (Fahham & Kartaatmaja, 2014), berbagai pihak—termasuk pemerintah Suriah, kelompok oposisi, dan kelompok ekstremis seperti ISIS—telah memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan propaganda (Amalia 2016). Pemerintah Suriah menggunakan platform seperti Facebook dan Twitter untuk membentuk narasi bahwa mereka sedang melawan terorisme, dengan tujuan mempengaruhi opini publik baik di dalam negeri maupun internasional. Di sisi lain, kelompok oposisi menggunakan media sosial untuk memposisikan diri mereka sebagai pejuang kebebasan, dengan harapan menarik simpati global dan memperoleh dukungan finansial serta logistik. Kelompok ekstremis seperti ISIS juga menggunakan media sosial dengan sangat canggih (Susanti & Ismira, 2023). Mereka menghasilkan video berkualitas tinggi yang diunggah ke YouTube dan menyebarkan narasi radikal melalui Telegram, yang tidak hanya berfungsi untuk merekrut anggota baru tetapi juga menciptakan ketakutan global. Laporan dari Oxford Internet Institute (2022)

mencatat bahwa lebih dari 50.000 akun terkait ISIS aktif selama puncak kekuasaannya, menggambarkan betapa luasnya penyebaran narasi digital dalam konflik ini.

Media digital juga berfungsi sebagai alat yang krusial untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM. Warga Suriah dan aktivis lokal sering memanfaatkan ponsel mereka untuk merekam kekerasan, seperti serangan udara, pemboman, atau penggunaan senjata kimia. Rekaman-rekaman ini kemudian diunggah ke media sosial atau dikirim ke organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch. Salah satu contohnya adalah video serangan senjata kimia di Ghouta Timur pada 2013 yang diunggah di akun YouTube Human Rights Watch dan menjadi bukti visual yang menarik perhatian internasional, memicu tekanan terhadap rezim Assad. Menurut laporan dari Syrian Archive, hingga 2023 lebih dari 5 juta dokumen digital terkait pelanggaran HAM telah terkumpul, sebagian besar berasal dari unggahan di media sosial. Data ini berpotensi besar untuk digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan transisi untuk mengadili pelaku kejahatan perang.

Selain untuk propaganda dan dokumentasi, media sosial juga memainkan peran penting dalam mobilisasi massa (Ema & Nayiroh, 2024). Sejak dimulainya protes anti-pemerintah pada Maret 2011, aktivis menggunakan platform seperti Facebook untuk mengorganisir aksi dan menyebarkan informasi kepada komunitas lokal maupun internasional. Tagar seperti #SaveSyria dan #StopTheWar sering menjadi trending di Twitter, menciptakan solidaritas global terhadap perjuangan rakyat Suriah. Namun, mobilisasi ini juga menghadapi tantangan besar. Selain pengawasan ketat oleh pemerintah yang sering berujung pada penangkapan aktivis, fenomena disinformasi juga melemahkan gerakan oposisi. Penelitian dari Reuters Institute menunjukkan bahwa lebih dari 40% konten terkait konflik Suriah yang beredar di media sosial mengandung disinformasi, yang sering digunakan untuk memecah belah kelompok oposisi dan menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat. Melihat peran media digital dalam propaganda, dokumentasi pelanggaran HAM, dan mobilisasi massa, jelas bahwa teknologi telah menjadi elemen yang sangat penting dalam konflik Suriah. Namun, di balik potensi besar ini, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi dalam proses transisi politik setelah konflik.

Kendati teori jaringan sosial dari Manuel Castells memandang media digital sebagai instrumen emansipasi yang mendorong proses demokratisasi, realitas di lapangan, khususnya dalam konteks konflik Suriah, justru menunjukkan ironi yang bertolak belakang. Alih-alih memperkuat masyarakat sipil sebagaimana diklaim oleh Castells, hasil analisis ini memperlihatkan bahwa media digital lebih sering dimanfaatkan oleh aktor dominan—baik pemerintah maupun kelompok bersenjata—untuk memperkuat kontrol politik. Hal ini terlihat dalam praktik propaganda terstruktur yang dijalankan oleh rezim Assad (Amalia, 2016) dan kelompok ISIS (Susanti & Ismira, 2023). Ketimpangan ini semakin kontras jika menilai media sosial dapat menjadi sarana mobilisasi damai; nyatanya, di Suriah, tagar seperti #SaveSyria kerap disalahgunakan melalui penyebaran disinformasi berskala besar (Reuters, 2022), yang justru menciptakan polarisasi daripada solidaritas. Lebih jauh lagi, upaya dokumentasi pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi alat akuntabilitas, dalam praktiknya sulit menghasilkan tindakan hukum konkret karena lemahnya sistem transisi pasca-konflik—sebuah kondisi yang berbeda dengan harapan yang ditunjukkan oleh Syrian Archive. Oleh karena itu, kasus Suriah menegaskan bahwa teknologi tidak bersifat netral; tanpa tata kelola yang adil dan inklusif, ia cenderung memperkuat dominasi kekuasaan. Kesimpulan ini tidak hanya menggugat optimisme teoritis Castells, tetapi juga memperkuat pandangan bahwa dalam konflik yang tidak seimbang, teknologi lebih mudah dikuasai oleh aktor yang lebih terorganisir.

Tantangan Teknologi dalam Proses Transisi Politik

Dalam konteks pasca-konflik, teknologi dan media digital sering dianggap sebagai alat yang dapat mempercepat transisi politik menuju stabilitas dan rekonsiliasi (Al Dajani, 2024). Namun, penggunaan teknologi dalam proses transisi politik di Suriah menghadapi sejumlah tantangan besar yang berpotensi menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Tantangan-tantangan ini meliputi penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, polarisasi sosial, dan keterbatasan infrastruktur teknologi.

Disinformasi menjadi salah satu hambatan utama dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung transisi politik. Aktor negara maupun non-negara sering menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau palsu guna memengaruhi opini publik (Ema & Nayiroh, 2024). Sebagai contoh, pada 2021, sebuah laporan dari Reuters Institute mengungkapkan bahwa lebih dari 30% unggahan di media sosial terkait konflik Suriah berisi disinformasi. Konten-konten ini sering kali dirancang untuk memperkuat narasi tertentu, baik dari pihak rezim maupun oposisi, yang kemudian memperburuk ketidakpercayaan di kalangan komunitas yang sudah terpecah. Contoh nyata adalah klaim palsu mengenai serangan kimia di Douma pada 2018. Narasi yang berbeda antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut menciptakan kebingungan di kalangan

masyarakat internasional. Disinformasi seperti ini tidak hanya menghalangi upaya untuk menemukan kebenaran, tetapi juga memperburuk ketegangan politik, baik di tingkat lokal maupun global.

Selain disinformasi, manipulasi opini publik melalui teknologi digital juga menjadi tantangan besar. Pemerintah dan kelompok tertentu sering memanfaatkan bot dan akun palsu untuk memengaruhi percakapan di media sosial (Faulina, Chatra, & Sarmiati, 2020). Sebuah studi oleh Carnegie Endowment for International Peace menemukan bahwa lebih dari 40% diskusi online mengenai pemilu dan transisi politik di Suriah dimanipulasi oleh bot yang dikelola oleh aktor negara. Sebagai contoh, saat membahas transisi politik pasca-Assad pada 2019, ribuan akun palsu yang diduga berafiliasi dengan rezim Assad memposting konten yang bertujuan mendiskreditkan oposisi. Strategi ini menciptakan kesan bahwa mayoritas rakyat Suriah mendukung rezim, meskipun kenyataannya jauh lebih kompleks. Manipulasi semacam ini merusak peluang untuk membangun dialog inklusif yang sangat dibutuhkan untuk mencapai stabilitas politik.

Teknologi juga semakin memperburuk polarisasi sosial di Suriah. Algoritma media sosial yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan sering kali memperkuat bias dan memisahkan individu ke dalam "ruang gema" (echo chambers). Hal ini membuat masyarakat Suriah yang sudah terpecah secara etnis dan sektarian semakin sulit menemukan kesepakatan bersama. Laporan dari International Crisis Group menyebutkan bahwa narasi sektarian di media sosial meningkat sebesar 25% sejak 2018, dengan mayoritas konten berasal dari kelompok ekstremis. Polarisasi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan dialog lintas komunitas yang diperlukan untuk transisi politik yang damai.

Selain tantangan sosial dan politik, keterbatasan infrastruktur teknologi di Suriah juga merupakan kendala signifikan. Banyak wilayah yang terdampak oleh konflik mengalami kerusakan pada infrastruktur internet dan komunikasi, yang membatasi akses masyarakat terhadap teknologi (Fahham & Kartaatmaja, 2014). Menurut data dari United Nations Development Programme (UNDP) pada 2022, hanya sekitar 35% penduduk Suriah yang memiliki akses internet yang stabil. Hal ini menciptakan kesenjangan digital yang menghambat partisipasi masyarakat dalam proses transisi politik (UNDP, 2022). Sebagai contoh, di daerah pedesaan yang paling terdampak perang, seperti Idlib dan Homs, banyak komunitas yang tidak dapat mengakses informasi terkini mengenai perkembangan politik karena infrastruktur internet yang rusak. Kondisi ini memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memiliki akses lebih baik terhadap teknologi, memungkinkan mereka untuk mendominasi narasi politik.

Berlawanan dengan pandangan AlDajani yang menganggap teknologi sebagai pemicu rekonsiliasi pasca-konflik, dinamika di Suriah justru menunjukkan bahwa media digital memperdalam perpecahan politik. Secara ironis, jika teori Faulina dkk. (Faulina, Chatra, dan Sarmiati 2020) menganggap penggunaan bot politik sebagai taktik manipulasi sementara, konteks Suriah menunjukkan bahwa strategi ini telah dilembagakan secara sistematis oleh rezim Assad—sekitar 40% diskursus politik direkayasa melalui bot, sehingga menciptakan bentuk “demokrasi semu” yang berkelanjutan. Selain itu, data dari UNDP (UNDP 2022) tentang ketimpangan akses internet—dengan sekitar 35% populasi tidak terhubung—menentang asumsi Ema & Nayiroh (Ema dan Nayiroh 2024) yang mengedepankan kesetaraan teknologi; kenyataannya, kesenjangan digital ini justru dijadikan alat oleh elite untuk mengontrol narasi. Ketimpangan ini terlihat jelas antara wilayah-wilayah administratif yang memiliki konektivitas tinggi dan daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, konteks Suriah tidak hanya meruntuhkan optimisme teoritis AlDajani, tetapi juga memperkuat argumen bahwa dalam masyarakat pasca-konflik, teknologi lebih sering digunakan oleh elite sebagai sarana dominasi digital daripada sebagai alat penyatuan sosial.

Potensi Teknologi dalam Rekonsiliasi Nasional

Teknologi memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung rekonsiliasi nasional di Suriah pasca-konflik (Al Dajani, 2024). Salah satu kekuatan utama teknologi adalah kemampuannya untuk menghubungkan individu dan komunitas yang terpisah secara geografis dan sosial. Mengingat masyarakat Suriah yang terfragmentasi akibat perbedaan sektarian, etnis, dan ideologis (Hapsari, 2020), teknologi dapat menyediakan ruang untuk dialog dan membantu membangun kembali kepercayaan di antara mereka.

Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp telah digunakan oleh diaspora Suriah untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman di tanah air. Studi UNDP menunjukkan bahwa 70% responden dari komunitas yang terfragmentasi di Suriah menganggap teknologi digital sebagai sarana yang dapat mengurangi ketegangan sosial (UNDP, 2022). Sebagai contoh, proyek "Digital Memory of Syria" telah mengumpulkan cerita pribadi dari berbagai individu yang terdampak konflik untuk mendorong pemahaman bersama. Inisiatif ini memperlihatkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membangun narasi inklusif dan mendorong penyembuhan kolektif.

Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan jarak jauh kepada generasi muda Suriah yang kehilangan akses ke pendidikan formal selama perang. Pendidikan berbasis teknologi ini bisa

diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, koeksistensi, dan keterampilan pemecahan konflik. Studi UNICEF mencatat bahwa 85% anak-anak di kamp pengungsi Suriah menggunakan perangkat digital untuk belajar, yang menunjukkan potensi besar teknologi dalam mendukung pembangunan sosial (UNICEF 2023).

Teknologi juga memainkan peran penting dalam mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia selama konflik (Clark & Dahi, 2023), yang dapat digunakan sebagai dasar bagi proses rekonsiliasi. Proyek seperti "Eye Witness to Atrocities" memungkinkan individu untuk merekam bukti pelanggaran yang dapat diterima di pengadilan internasional. Keberhasilan teknologi serupa di Rwanda dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa dokumentasi yang akurat dapat membantu masyarakat mengatasi masa lalu yang penuh kekerasan dan membangun masa depan yang lebih damai. Namun, potensi ini juga datang dengan tantangan. Penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan kebencian atau memanipulasi opini publik dapat merusak upaya rekonsiliasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tepat dan keterlibatan masyarakat sipil untuk memastikan teknologi digunakan secara konstruktif.

Peran Teknologi dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

Setelah konflik, rekonstruksi ekonomi dan infrastruktur menjadi fokus utama dalam upaya membangun kembali Suriah yang hancur akibat perang panjang. Teknologi, dengan inovasi yang dimilikinya, dapat berperan penting dalam mempercepat proses tersebut. Rekonstruksi tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era Society 5.0 (Budijaya, Situmeang, & Tasikmalaya, 2025). Dengan mengintegrasikan solusi digital, pemerintah transisi, organisasi internasional, dan sektor swasta bisa mengatasi berbagai hambatan seperti kerusakan fisik pada infrastruktur, tantangan logistik, serta keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.

Salah satu kontribusi besar teknologi adalah dalam mendukung pengelolaan proyek pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, penggunaan teknologi drone dapat mempercepat pemetaan daerah yang rusak akibat konflik dengan lebih efisien. Drone dapat menghasilkan peta digital berkualitas tinggi yang membantu mengidentifikasi prioritas rekonstruksi, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Selaras dengan tulisan Warsito bahwa penggunaan drone lebih efisien, karena pengolahan data lapangan sampai menjadi peta digital hanya membutuhkan waktu beberapa jam (Warsito, 2021). Keberhasilan penerapan teknologi ini terlihat dalam proyek rekonstruksi Mosul, Irak (Brenger, 2006), di mana drone digunakan untuk memetakan kerusakan akibat perang melawan ISIS. Teknologi ini memungkinkan perencanaan yang lebih akurat, mengurangi kesalahan, serta menghemat waktu dan biaya. Selain itu, teknologi berbasis blockchain dapat membantu memastikan transparansi dalam distribusi dana rekonstruksi (Gebert & European Blockchain Association, 2024). Menurut laporan Transparency International, korupsi merupakan salah satu tantangan utama dalam proyek pasca-konflik. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi keuangan secara terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dana. UNDP, misalnya, telah menguji penggunaan blockchain dalam distribusi bantuan kemanusiaan di beberapa negara konflik, termasuk Yaman, dengan hasil yang positif. Maka, penggunaan teknologi memiliki peran sentral untuk membangun kembali infrastruktur di Suriah. Dengan sistem yang sudah tertata dan terintegrasi memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk menata ulang wilayah yang rusak. Teknologi digital juga berperan penting untuk memberikan laporan secara transparan dan menghindari kemungkinan penyalahgunaan keuangan.

Di bidang ekonomi, teknologi informasi dapat menjadi penggerak utama dalam membangun kembali sektor usaha kecil dan menengah (UKM), yang sebelumnya merupakan tulang punggung ekonomi Suriah. Platform digital seperti marketplace online memberi akses pasar bagi pengusaha lokal untuk menjual produk mereka, baik domestik maupun internasional. Menurut laporan Bank Dunia, UKM yang memanfaatkan platform digital berpotensi meningkatkan pendapatan hingga 50% dibandingkan yang tidak terhubung dengan teknologi. Teknologi juga membantu mengatasi tantangan pendidikan dan pelatihan kerja yang sangat penting untuk mendukung rekonstruksi ekonomi. Program pendidikan daring seperti MOOCs (*Massive Online Open Courses*) dapat digunakan untuk melatih kembali tenaga kerja Suriah yang kehilangan pekerjaan akibat konflik. Sebagai contoh, program Coursera for Refugees yang diinisiasi UNHCR telah membantu ribuan pengungsi Suriah memperoleh pelatihan keterampilan baru yang relevan dengan pasar kerja global (UNHCR, 2023). Dengan memperluas akses teknologi ini di Suriah, tenaga kerja yang terampil dapat membantu membangkitkan ekonomi lokal.

Lebih jauh lagi, internet dan teknologi komunikasi dapat mempercepat rekonstruksi sosial dengan menghubungkan komunitas lokal, diaspora, dan aktor internasional. Aplikasi berbasis komunitas seperti "Ibuild" dapat digunakan untuk melibatkan warga Suriah dalam proses rekonstruksi. Aplikasi ini memungkinkan warga melaporkan kebutuhan lokal mereka, seperti perbaikan infrastruktur atau distribusi bantuan, langsung ke pemerintah atau organisasi bantuan. Dengan demikian, teknologi menjadi jembatan yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara mereka.

Penerapan teknologi dalam rekonstruksi Suriah menghadapi beberapa tantangan, namun memiliki potensi yang besar. Infrastruktur teknologi yang rusak, kurangnya akses internet di beberapa wilayah, dan kesenjangan digital antar kelompok masyarakat adalah hambatan yang harus diatasi. Menurut laporan Reuters, hanya sekitar 45% populasi Suriah yang memiliki akses internet yang stabil (Reuters, 2022). Untuk mengatasi hal ini, investasi besar dalam infrastruktur teknologi seperti pengembangan jaringan 5G atau satelit internet harus menjadi bagian dari strategi rekonstruksi.

Dalam konteks geopolitik, teknologi juga dapat berfungsi sebagai alat diplomasi untuk menarik bantuan internasional. Negara donor cenderung lebih bersedia berkontribusi pada proyek yang transparan dan berbasis teknologi modern, yang menjamin akuntabilitas dan efisiensi. Dengan mengadopsi teknologi canggih dalam proyek rekonstruksi, Suriah dapat membangun kepercayaan dengan komunitas internasional sekaligus menarik investasi asing.

Transisi dari konflik menuju rekonstruksi bukanlah tugas mudah, tetapi dengan memanfaatkan teknologi secara strategis, Suriah memiliki peluang besar untuk mempercepat proses ini. Penerapan teknologi yang inklusif, transparan, dan partisipatif dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan. Teknologi bukan hanya alat, tetapi juga katalisator untuk menyatukan kembali masyarakat yang terpecah, memperkuat ekonomi lokal, dan membangun infrastruktur yang lebih baik daripada sebelumnya.

Walaupun AlDajani dan Budijaya dkk. secara optimis melihat teknologi sebagai pendorong rekonsiliasi dan pembangunan pasca-konflik, situasi di Suriah justru mengungkap kesenjangan tajam antara idealisme teoritis dan kenyataan di lapangan. Penelitian Clark & Dahi (Clark dan Dahi 2023) mengenai dokumentasi pelanggaran HAM secara digital mengindikasikan bahwa teknologi kerap menghasilkan bentuk "rekonsiliasi semu"—sekalipun inisiatif seperti "Digital Memory of Syria" berhasil mengarsipkan kesaksian korban, pelaksanaan keadilan transisi tetap terhambat oleh dinamika politik. Lebih lanjut, laporan UNDP yang mencatat 70% partisipasi digital tampak bertentangan dengan temuan Reuters yang menunjukkan hanya 45% populasi memiliki akses internet yang stabil, menjelaskan bahwa inklusi digital di wilayah konflik cenderung berpihak pada kelompok elite dan menyingkirkan komunitas rentan seperti pengungsi di daerah terpencil. Bahkan teknologi seperti blockchain, yang oleh Gebert dipandang menjanjikan untuk memperkuat transparansi, dalam praktiknya kerap ditolak oleh aktor lokal yang diuntungkan dari korupsi—fenomena serupa juga tercatat oleh Transparency International di Yaman. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi di Suriah lebih sering terjebak dalam "paradoks Society 5.0": meskipun menjanjikan solusi teknologis canggih, ia gagal menjawab akar persoalan struktural dan politik.

Pembelajaran dari Konflik Lain

Contoh kasus konflik di negara lain dapat memberikan wawasan berharga tentang penggunaan teknologi dalam situasi konflik dan transisi politik (Yara, 2023). Di Irak, misalnya, teknologi memainkan peran penting dalam pemilu pertama pasca-invasi AS pada tahun 2005 (Brenger, 2006). Sistem biometrik diperkenalkan untuk memastikan keabsahan pemilih dan mencegah kecurangan. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital menyebabkan implementasi sistem ini tidak sepenuhnya berhasil. Pengalaman ini menggarisbawahi bahwa meskipun teknologi menawarkan solusi potensial, hal tersebut tetap memerlukan dukungan yang kuat dari kapasitas lokal serta pelatihan masyarakat.

Di Afghanistan, setelah jatuhnya rezim Taliban pada 2001, teknologi digunakan secara luas dalam program pembangunan dan pendidikan. Salah satu contoh penting adalah proyek Roshan, sebuah operator telekomunikasi yang menyediakan layanan komunikasi di daerah-daerah terpencil. Menurut laporan Bank Dunia (Bank Dunia, 2021), peningkatan akses komunikasi di Afghanistan membantu memperbaiki konektivitas ekonomi dan sosial, meskipun konflik yang terus berlangsung sering menghambat efektivitasnya. Penggunaan teknologi dalam pendidikan, seperti kelas daring untuk perempuan di wilayah yang dikuasai Taliban, juga memberikan inspirasi bagi upaya rekonsiliasi di Suriah, meskipun tantangan terkait keamanan tetap menjadi isu utama.

Di Myanmar, penggunaan media sosial seperti Facebook selama krisis Rohingya menunjukkan dampak negatif teknologi dalam konflik. Platform ini digunakan untuk menyebarkan kebencian dan menghasut kekerasan terhadap minoritas (BBC, 2018). Laporan Human Rights Watch menyebutkan bahwa kurangnya pengawasan terhadap media sosial memperburuk polarisasi dan kekerasan, yang menjadi pelajaran penting untuk situasi Suriah pasca-konflik. Di Suriah, pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap teknologi digital harus menjadi prioritas untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan.

Studi kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi Suriah. Pengalaman Irak dan Afghanistan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur teknologi yang inklusif serta pengembangan kapasitas masyarakat lokal. Sementara itu, kasus Myanmar mengingatkan akan risiko penggunaan teknologi tanpa

pengawasan yang memadai. Kombinasi antara peluang dan tantangan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam merancang kebijakan teknologi untuk mendukung transisi dan rekonsiliasi di Suriah.

Secara keseluruhan, pembelajaran dari konflik di negara-negara lain menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun masyarakat yang lebih damai dan inklusif, asalkan diiringi dengan strategi yang terencana dengan baik dan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Dalam konteks Suriah, ini berarti memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan komunikasi antar komunitas, menciptakan peluang ekonomi baru, dan memastikan partisipasi politik yang lebih luas. Dengan pendekatan yang tepat, pelajaran dari negara lain dapat diterapkan untuk mempercepat proses rekonsiliasi dan rekonstruksi di Suriah pasca-konflik.

Berbeda dengan pandangan Yara (Yara, 2023) yang menganggap pembelajaran lintas negara sebagai pedoman universal dalam menerapkan teknologi untuk rekonsiliasi, kajian komparatif atas konflik di Irak, Afghanistan, dan Myanmar justru menyingkap paradoks yang menggoyahkan asumsi determinisme teknologi. Kegagalan sistem biometrik di Irak akibat rendahnya tingkat literasi digital (Brenger, 2006) meruntuhkan optimisme Bank Dunia mengenai keberhasilan transformasi digital di Afghanistan. Sementara itu, kasus Myanmar (BBC, 2018) tidak sekadar mencerminkan potensi penyalahgunaan media sosial, tetapi memperlihatkan bagaimana platform seperti Facebook secara sistemik memperkuat kekerasan. Ironisnya, meskipun studi-studi tersebut menekankan perlunya regulasi (*Human Rights Watch*), di konteks Suriah regulasi justru berisiko digunakan oleh rezim untuk menekan suara oposisi. Oleh karena itu, pengalaman lintas negara bukanlah formula seragam untuk rekonsiliasi berbasis teknologi, melainkan peringatan akan rumitnya penerapan solusi teknis dalam lanskap konflik yang didominasi oleh faktor politik dan struktural.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti peran ganda teknologi dan media digital yang bersifat ambivalen dalam dinamika konflik Suriah pasca runtuhnya kekuasaan Bashar al-Assad. Di satu sisi, teknologi memiliki potensi untuk mendukung proses rekonsiliasi dan pemulihan, antara lain melalui pendokumentasian pelanggaran HAM, penggalangan solidaritas internasional, serta peningkatan transparansi ekonomi melalui pemanfaatan blockchain dan big data. Namun di sisi lain, teknologi juga dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran disinformasi, polarisasi sosial, dan manipulasi opini publik, yang justru memperdalam perpecahan di masyarakat. Pengalaman dari kasus-kasus serupa di Irak dan Afghanistan menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan teknologi dalam fase transisi politik sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, kapasitas lokal, serta keberadaan regulasi yang inklusif dan adil.

Guna memaksimalkan kontribusi teknologi dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di Suriah, penelitian ini mengusulkan strategi kebijakan yang menyeluruh. Pertama, perlu dilakukan peningkatan literasi digital dan penguatan infrastruktur teknologi guna memastikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, diperlukan regulasi yang tegas terhadap praktik disinformasi dan manipulasi digital, tanpa mengabaikan pentingnya menjaga ruang bagi partisipasi aktif masyarakat sipil. Ketiga, teknologi harus dimanfaatkan untuk membangun narasi yang inklusif serta mendorong komunikasi lintas kelompok sosial. Melalui pendekatan ini, teknologi memiliki potensi untuk menjadi penggerak rekonstruksi Suriah yang berkelanjutan, meskipun hambatan politik dan struktural tetap memerlukan penanganan secara paralel.

Daftar Pustaka

- AlDajani, I. M. (2024). Digital research in reconciliation conflict transformation and peace studies. In I. M. AlDajani & M. Leiner (Eds.), *Reconciliation, conflict transformation, and peace studies* (pp. 161–190). Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47839-0_9
- Amalia, N. R. (2016). Propaganda media sosial Facebook dan blog dalam berkembangnya konflik di Suriah dan Mesir 2011-2013. *ETTISAL Journal of Communication*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.21111/ettisal.v1i1.1052>
- BBC. (2018, September 14). Bagaimana Facebook ‘turut sebar kebencian’ terhadap warga Muslim Rohingya di Myanmar. *BBC News*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45496204?utm_source=chatgpt.com
- Budijaya, M. I., Situmeang, M., & YPPT Priatim Tasikmalaya, S. T. (2025). Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan: Analisis efektivitas pelayanan publik berbasis aplikasi di era Society 5.0. *Jurnal Penelitian*, 5(2), 1–13.
- Castells, M. (2013). *Networks of outrage and hope – social movements in the Internet age* (Vol. 25). International Journal of Public Opinion Research. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edt020>
- Clark, J., & Dahi, O. (2023). Documenting atrocities: Technology and transitional justice in Syria. *International Journal of Transitional Justice*, 17(2), 200–218. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijad008>

- Brenger, D. R. (2006). *Cybermedia go to war: Role of converging media during and after the 2003 Iraq War*. Marquette Books.
- Bank Dunia. (2021). Connectivity and conflict: The role of telecommunications in Afghanistan's reconstruction. *World Development Report*, 39(21), 1–25. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9876>
- Ema, & Nayiroh, L. (2024). Komunikasi media sosial sebagai alat mobilisasi gerakan sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial dan Informasi*, 9(1), 221–238. <http://dx.doi.org/10.52423/jikuho.v9i1.159>
- Fahham, A. M., & Kartaatmaja, A. M. (2014). Konflik Suriah: Akar masalah dan dampaknya. *Jurnal Penelitian*, 5(1), 37–60. <https://doi.org/10.22212/jp.v5i1.332>
- Faulina, A., Chatra, E., & Sarmiati, S. (2020). Peran buzzer dan konstruksi pesan viral dalam proses pembentukan opini publik di new media. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.29210/30031390000>
- Gebert, M., & European Blockchain Association. (2024). AI-powered blockchain technology in Industry 4.0: Exploring the transformative synergy of AI and blockchain technologies. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16929.21600>
- Hapsari, R. D. (2020). Aliansi etnis Kurdi di perbatasan selama krisis politik Suriah tahun 2011-2016. *Global and Policy Journal of International Relations*, 7(01). <https://doi.org/10.33005/jgp.v7i01.1810>
- Reuters. (2022, February 21). Syria awards third mobile telecoms licence to Wafa—state media. *Euro News*. <https://www.euronews.com/next/2022/02/21/syria-telecoms>
- SOHR. (2021, June). Total death toll: Over 606,000 people killed across Syria since the beginning of the 'Syrian Revolution', including 495,000 documented by SOHR. SOHR. <https://www.syriahr.com/en/217360/>
- Susanti, E., & Ismira, A. (2023). Analisis propaganda Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia melalui jalur media sosial. *Jurnal Penelitian*, 3(2).
- UNDP. (2022). e-Justice: Digital transformation to close the justice gap. United Nations Development Programme. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/E-Report_05.pdf
- UNHCR. (2022). Message from the United Nations humanitarian, refugee, and development chiefs on the situation in Syria and the region. UNHCR. <https://www.unhcr.org/news/news-releases/message-united-nations-humanitarian-refugee-and-development-chiefs-situation>
- UNHCR. (2023). Connected education for refugees: Addressing the digital divide. UNHCR. <https://www.unhcr.org/refugee-connected-education-challenge>
- UNICEF. (2023). UNICEF's global initiatives work to ensure that all children, including those excluded or marginalized, can benefit from digital learning. *Unicef Digital Education*. https://www.unicef.org/digitaleducation/initiatives?utm_source=chatgpt.com
- Warsito, T. H. (2021). Perkembangan drone untuk pemetaan dan pemanfaatannya dalam bidang infrastruktur permukiman. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 9(2). <https://doi.org/10.23960/jitet.v9i2.2426>
- Yara, A.-S. (2023). Post-war Syria: Digital technologies between reconciliation and surveillance. *International Journal of Transitional Justice*, 17(1), 102–120. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijad005>